

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian
Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan
Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon
Terpilih Dalam Pemilihan Umum.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 8/G/2024/PTUN.SMG.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 1530 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Purworejo Nomor 556 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Buku

Abdullah, Rozali, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.

Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Baba, Mastang A., *Analisis Data Kualitatif*, Makassar: Penerbit Aksara Timur, 2017.

Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007.

Huda, Nurul, *Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia*, Bandung: Fokusmedia, 2018.

Kelsen, Hans, *General Theory of Law and State*, Cambridge: Harvard University Press, 2009.

Komisi Pemilihan Umum, Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, *Menjawab Problematika Hukum Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Sengketa Verifikasi Parpol Pemilu 2024*, Jakarta: Komisi Pemilihan Umum, 2022.

Mujiburohman, Dian A., *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Yogyakarta: STPN Press, 2022.

Sodikin, *Hukum Pemilu*, Bekasi: Gramata Publishing, 2014.

Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, Depok: Rajawali Pers, 2022.

Tjandra, Riawan, *Peradilan Tata Usaha Negara Mendorong Terwujudnya Pemerintahan Yang Bersih dan Berwibawa*, Yogyakarta: Liberty, 2009.

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Wahyunadi, Yodi, M. *Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Sistem Peradilan di Indonesia* (Jakarta: Biro Hukum dan Humas MA, 2013),

Artikel Jurnal Ilmiah

Abi Sugara dan Arif Wibowo, “Eksistensi Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia,” *Jurnal Penelitian Multidisiplin* 1, no. 2, (Desember, 2022), <https://journal.pbnsurabaya.co.id/index.php/jupm/article/download/65/39/156>

B.K. Illahi, I Gusri, dan G. A. Sugianto, “Implikasi Hukum Perluasan Kewenangan PTUN Dalam Mengadili Permasalahan Hukum Pemilu,” *Awasia Jurnal Pemilu dan Demokrasi* 1, no. 2 (Desember, 2021), <https://jurnal.banten.bawaslu.go.id/index.php/awasia/article/view/59/41>

Bimasakti, Muhammad A., “Permasalahan Aspek Formil Penyelesaian Sengketa Pembatalan Penetapan Calon Anggota DPR dan DPRD Kabupaten/Kota/Provinsi Terpilih”, *Jurnal Hukum PERATUN* 4, no. 2, (Agustus, 2021), <https://jurnalhukumperatun.mahkamahagung.go.id/index.php/peratun/article/download/183/48/286>

Bisariyadi, Anna Triningsih, dkk, “Komparasi Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilu di Beberapa Negara Penganut Paham Demokrasi Konstitusional”, *Jurnal Konstitusi* 9, no. 3, (September, 2012), <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/936/142>

Ermawati, Sri W., “Kewenangan Atau Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Atas Subyek Sengketa Di Indonesia” *Justices: Jurnal of Law* 3, no. 1, (Maret, 2024), <https://justices.pdfaii.org/index.php/i/article/download/7/33/494>

Fabio Emiliano Kolang, Audi H. Pondaag, dan Josina E. Londa, “Penyelenggaraan Pemilihan Umum Yang Jujur, Adil Dan Bersih Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum,” *Lex Administratum* 10, no. 4 (Juli, 2022),

<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/42546/37541>

Khairo, Fatria. "Urgensi Pembatasan Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia", *Lex Librum* 3, no. 1 (Juni, 2017),
<https://lexlibrum.id/index.php/lexlibrum/article/view/54/pdf>

Muhdlor, Ahmad Z., "Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum" *Jurnal Hukum dan Peradilan* 1, no. 2, (Juli, 2012),
<https://jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/view/138>

Pariadi, Gusti Ayu R.D., dan Ahmad Rifai, "Aspek Yuridis Kedudukan Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dalam Sistem Peraturan Perundang-undangan di Indonesia", *Unizar Recht Journal* 2, no. 3 (Oktober, 2023), <https://urj.unizar.ac.id/urj/article/view/132/56>

Rikardo, Ofis. "Penerapan Kedaulatan Rakyat di dalam Pemilihan Umum di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", *Jurnal Hukum Sasana* 6, no. 1, (Juni, 2020),
<https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/SASANA/article/view/228/200>

Salmon, Hendrik, "Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Dalam Mewujudkan Suatu Pemerintahan Yang Baik," *Jurnal Sasi* 16, no. 4 (Oktober-Desember, 2010),
https://ejournal.unpatti.ac.id/ppr_paperinfo_lnk.php?id=89

Syahputra, Agus, “Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Melalui Mediasi (Studi di Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Nagan Raya)”, *Luris Pedia Jurnal Kajian Hukum* 1, no. 3, (Oktober-Januari, 2023-2024), <https://jurnal.bundamediagrup.co.id/index.php/iuris/article/viewFile/394/336>

Yati Nurhayati, Ifrani, dan M.Yasir Said, “Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum” *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* (JPHI) 2, no. 1, (Februari, 2021), <https://ojs.bdproject.id/index.php/jphi/article/view/14>